



Peran NGO Transnasional dalam Konservasi Penyu di Kabupaten Berau: Studi Dokumen Yayasan Penyu Indonesia

Vinna Faulina^{1*}, Khoirul Amin¹, Mohammad Dziqie Aulia Al Farauqi¹

¹ Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kalimantan, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: vfaulina26@gmail.com

Article History:

Received: January 12, 2026

Revised: February 10, 2026

Accepted: February 21, 2026

Keywords:

Transnational NGOs, Sea Turtle Conservation, Indonesian Turtle Foundation

Abstract: Sea turtle conservation represents a global environmental challenge that increasingly involves non-state actors, particularly transnational non-governmental organizations (NGOs). This study examines the role of transnational NGOs in sea turtle conservation efforts in Berau Regency, Indonesia, with a focus on cooperation patterns, funding mechanisms, and the transfer of global conservation norms to the local level. Employing a qualitative research design, the study utilizes a document-based approach by analyzing annual reports, cooperation documents, program descriptions, and official publications of the Indonesian Turtle Foundation (Yayasan Penyu Indonesia / YPI), which functions as the implementing partner of transnational NGOs. Data were analyzed through thematic procedures encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the role of transnational NGOs extends beyond financial assistance to include strengthening local institutional capacity, standardizing conservation practices in accordance with global norms, and fostering active participation among coastal communities. Notably, the study identifies a significant shift in community behavior, particularly among coastal residents who were previously involved in egg harvesting and have gradually transformed into active nest protectors and conservation volunteers as a result of NGO-led education, incentive schemes, and community-based conservation programs. The study further demonstrates that sea turtle conservation in Berau is implemented through a multi-actor governance framework involving NGOs, international donors, local governments, and community stakeholders, reflecting the dynamics of global environmental governance. Additionally, the research highlights the process of global norm diffusion, whereby international conservation values are translated into localized practices through education, advocacy, and community engagement. By situating sea turtle conservation within an international relations perspective, this study contributes to the literature by emphasizing the political and governance dimensions of environmental conservation and underscoring the strategic significance of transnational NGOs in shaping sustainable conservation outcomes at the local level.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Faulina, V., Amin, K., & Farauqi, M. D. A. A. (2026). Peran Ngo Transnasional dalam Konservasi Penyu di Kabupaten Berau: Studi Dokumen Yayasan Penyu Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1534-1545. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5657>

PENDAHULUAN

Dalam konteks ini, isu konservasi tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan teknis-ekologis, melainkan sebagai bagian dari dinamika politik global yang melibatkan interaksi norma, kekuasaan, dan kepentingan lintas aktor serta lintas tingkat tata kelola (Bernstein, 2014). Pandangan ini menempatkan konservasi sebagai arena tata kelola lingkungan global (global environmental governance) yang ditandai oleh fragmentasi

otoritas dan keterlibatan aktor non-negara secara intensif (Young, 2017). Peran NGO transnasional semakin menonjol dalam membentuk norma, menetapkan agenda, serta memengaruhi praktik tata kelola lingkungan yang melampaui batas negara. Melalui jaringan advokasi lintas batas negara, aktor-aktor ini memanfaatkan dan menyebarkan informasi secara strategis untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai isu global (Keck & Sikkink, 1998). Dalam perspektif hubungan internasional, dinamika ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari tata kelola yang bersifat negara-sentris menuju pola kolaboratif lintas aktor dan lintas tingkat (Betsill & Corell, 2008). Hal ini menegaskan bahwa konservasi lingkungan, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan arena politik global yang melibatkan interaksi berbagai aktor di luar struktur negara.

Kabupaten Berau memiliki tingkat signifikansi yang tinggi dalam konteks konservasi penyu laut di Indonesia, khususnya bagi spesies penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Sejumlah kajian dan laporan konservasi menunjukkan bahwa kawasan pesisir Berau, terutama di wilayah Kepulauan Derawan dan sekitarnya, termasuk salah satu lokasi peneluran terpenting bagi penyu hijau di Indonesia bagian timur, dengan intensitas peneluran yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa lokasi lain seperti pesisir selatan Jawa atau sebagian wilayah Sumatra (Wallace et al., 2011; Yayasan Penyu Indonesia, 2020–2023). Kondisi ini memperkuat posisi Berau sebagai bagian dari kawasan dengan nilai konservasi global yang signifikan, sejalan dengan penilaian lembaga internasional yang menempatkan wilayah perairan Indonesia sebagai hotspot keanekaragaman hayati laut dunia (UNEP, 2014). Selain itu, keberadaan penyu sisik di perairan Berau juga memiliki nilai strategis karena spesies ini tergolong sangat terancam secara global dan menunjukkan kecenderungan penurunan populasi di banyak wilayah Indonesia akibat eksploitasi historis dan degradasi habitat (Hamann et al., 2010).

Dibandingkan dengan wilayah konservasi penyu lain yang lebih mapan secara kelembagaan, seperti Bali atau Pangumbahan di Jawa Barat, upaya konservasi di Berau dihadapkan pada tantangan geografis, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta ketergantungan masyarakat pesisir pada sumber daya alam. Keterbatasan ini mencerminkan kondisi umum negara berkembang, di mana kapasitas negara sering kali tidak memadai untuk mengelola isu lingkungan kompleks tanpa dukungan aktor non-negara (Dauvergne & LeBaron, 2014). Kondisi tersebut menjadikan keterlibatan NGO transnasional dan mitra internasional semakin krusial, tidak hanya untuk menyediakan pendanaan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, mentransfer standar konservasi global, serta mengintegrasikan kawasan Berau ke dalam jaringan konservasi penyu pada skala regional dan global. NGO transnasional memainkan peran strategis dalam menjembatani kepentingan global dan konteks lokal melalui advokasi, pengelolaan pengetahuan, serta fasilitasi kolaborasi lintas aktor, khususnya dalam isu lingkungan hidup (Betsill & Corell, 2008).

Meskipun keterlibatan NGO transnasional dalam konservasi penyu semakin nyata, kajian akademik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan ekologis dan biologis. Aspek politik global, peran aktor non-negara, serta dinamika relasi kekuasaan dalam tata kelola konservasi relatif belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal aktor non-negara tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, melainkan turut berperan dalam membentuk dan mengarahkan mekanisme tata kelola di luar struktur negara. Dalam konteks ini, konservasi penyu juga dapat dipahami sebagai proses difusi norma global, di mana nilai-nilai internasional mengenai perlindungan spesies terancam diinternalisasi ke

tingkat lokal melalui praktik NGO dan jejaring transnasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Selain itu, tantangan utama dalam konservasi penyu pada tingkat global tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan akan koordinasi dan pengelolaan lintas aktor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam memahami peran NGO transnasional dari perspektif hubungan internasional (Arts, 2003; Hamann et al., 2010).

Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pengetahuan, sejumlah keterbatasan masih belum banyak mendapat perhatian. Penelitian mengenai NGO transnasional umumnya lebih menekankan peran mereka dalam proses negosiasi internasional atau dalam isu perubahan iklim pada skala global (Andonova et al., 2009; bulkeley & newell, 2010). Di sisi lain, studi tentang konservasi penyu cenderung berfokus pada dimensi biologis serta penentuan prioritas ekologis spesies (Hamann et al., 2010; Wallace et al., 2011). Dengan demikian, kajian yang secara khusus menganalisis peran NGO transnasional dalam konservasi penyu di tingkat lokal masih relatif terbatas, terutama penelitian yang menggunakan perspektif hubungan internasional dengan pendekatan studi dokumen untuk menganalisis proses transfer norma, dinamika relasi kekuasaan, serta pola tata kelola kalaboratif antara aktor global dan lokal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kajian mengenai NGO transnasional dengan isu konservasi penyu dalam satu kerangka analisis hubungan internasional. Penelitian ini tidak memandang NGO semata sebagai pelaksana teknis kegiatan konservasi, melainkan sebagai aktor politik global yang berperan dalam penyebaran norma serta pembentukan pola tata kelola lingkungan. Dengan menitikberatkan analisis pada studi dokumen Yayasan Penyu Indonesia (YPI) di Kabupaten Berau, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru yang mengaitkan praktik advokasi transnasional dengan pelaksanaan konservasi spesies laut di tingkat lokal, suatu pendektan yang masih relatif jang dijumpai dalam literatur terdahulu.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami konservasi penyu sebagai bagian dari tata kelola lingkungan global yang melibatkan interaksi berbagai aktor pada beragam tingkat. Upaya perlindungan penyu menuntut kerjasama lintas batas negara, mengingat efektivitas konservasi sangat bergantung pada koordinasi antarkawasan seiring dengan karakter migrasi spesies tersebut (Wallace et al., 2011). Tanpa pemahaman yang kompeherensif mengenai peran NGO transnasional, kebijakan konservasi berpotensi terjebak pada pendekatan yang semata-mata bersifat lokal dan mengabaikan dinamika global yang turut membentuknya. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hubungan internasional, sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan konservasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

1. NGO Transnasional dalam Hubungan Internasional

Dalam kajian Hubungan Internasional kontemporer, aktor non-negara memiliki peran yang semakin signifikan dalam dinamika politik global. Salah satu aktor non-negara yang menonjol adalah organisasi non-pemerintah transnasional (transnational non-governmental organizations). Keck dan Sikkink (1998) mendefinisikan NGO transnasional sebagai organisasi yang beroperasi lintas batas negara dan terhubung melalui jaringan advokasi untuk memengaruhi kebijakan, norma, serta praktik tata kelola global.

Keberadaan NGO transnasional menandai pergeseran dari pendekatan negara-sentris menuju tata kelola global yang lebih inklusif dan multi-aktor.

NGO transnasional tidak hanya berperan sebagai pelaksana program teknis, tetapi juga sebagai agen normatif yang menyebarluaskan nilai, standar, dan praktik global. Dalam isu lingkungan, NGO transnasional berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan global dan konteks lokal, khususnya dalam mengimplementasikan agenda konservasi yang bersifat lintas negara. Peran ini menjadi semakin relevan dalam isu perlindungan spesies migratori seperti penyu laut, yang habitat dan pergerakannya melampaui batas teritorial negara.

2. Transnational Advocacy Network (TAN)

Kerangka Transnational Advocacy Network (TAN) yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink (1998) menjelaskan bagaimana jaringan NGO lintas negara bekerja melalui pertukaran informasi, advokasi, dan tekanan politik untuk memengaruhi kebijakan. Jaringan ini mengandalkan empat strategi utama, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Melalui mekanisme tersebut, NGO transnasional mampu mengangkat isu lingkungan lokal ke tingkat global sekaligus menyalurkan sumber daya internasional ke tingkat lokal.

Dalam konteks konservasi penyu, TAN memungkinkan NGO transnasional untuk menghubungkan komunitas lokal, donor internasional, serta institusi pemerintah dalam satu jaringan kerja kolaboratif. Dengan demikian, konservasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekologis, tetapi juga sebagai proses politik yang melibatkan relasi kekuasaan dan negosiasi lintas aktor.

3. Global Environmental Governance *Boomerang Pattern*

Konsep *Global Environmental Governance* (GEG) menjelaskan bahwa pengelolaan isu lingkungan global tidak lagi didominasi oleh negara sebagai aktor tunggal, melainkan dijalankan melalui interaksi berbagai aktor lintas tingkat, termasuk NGO transnasional, organisasi internasional, donor global, pemerintah, dan masyarakat sipil (Bulkeley & Newell, 2010). Dalam kerangka ini, pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan berlangsung secara multi-level, mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional, dengan alur pengaruh yang tidak selalu bersifat hierarkis.

Dalam praktiknya, tata kelola lingkungan global sering kali beroperasi melalui mekanisme tidak langsung, salah satunya melalui pola advokasi *Boomerang Pattern* sebagaimana dikemukakan oleh Keck dan Sikkink (1998). Ketika aktor lokal menghadapi keterbatasan akses atau lemahnya respons kebijakan di tingkat domestik, isu lingkungan diangkat ke jaringan internasional untuk memperoleh legitimasi, dukungan, dan tekanan global. Tekanan tersebut kemudian “dipantulkan kembali” ke negara atau pemerintah daerah dalam bentuk tuntutan akuntabilitas, penguatan regulasi, serta penyesuaian kebijakan agar sejalan dengan norma lingkungan global.

Dalam konteks konservasi penyu laut, GEG tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif global, tetapi juga sebagai arena politik yang memungkinkan terjadinya *Boomerang Pattern*. Isu lokal seperti perlindungan habitat peneluran, pengendalian eksploitasi telur penyu, dan pelibatan masyarakat pesisir dapat memperoleh perhatian internasional karena status penyu sebagai spesies migratori yang dilindungi secara global. NGO transnasional berperan penting dalam menjembatani isu lokal tersebut dengan

forum, donor, dan rezim lingkungan internasional, sehingga mendorong terbentuknya tekanan normatif dan material terhadap kebijakan nasional maupun daerah.

Dengan demikian, konservasi penyu di Kabupaten Berau dapat dipahami sebagai bagian dari praktik *Global Environmental Governance* yang bersifat dinamis dan sirkular. Tata kelola konservasi tidak hanya bergerak dari atas ke bawah (global ke lokal), tetapi juga dari bawah ke atas (lokal ke global) melalui mekanisme *Boomerang Pattern*. Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas konservasi penyu sangat bergantung pada kemampuan NGO transnasional dalam mengartikulasikan isu lokal ke dalam agenda global dan memobilisasi kembali pengaruh internasional untuk memperkuat kebijakan dan praktik konservasi di tingkat nasional dan daerah.

4. Transfer Norma Global dan Perspektif Konstruktivisme

Perspektif konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menekankan pentingnya norma, nilai, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional. Menurut konstruktivisme, norma global tidak bersifat statis, melainkan ditransfer dan diinternalisasi melalui proses sosial, termasuk edukasi, advokasi, dan praktik kelembagaan. NGO transnasional berperan sebagai agen utama dalam proses transfer norma tersebut.

Dalam konservasi penyu, norma global mengenai perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan ditransformasikan ke dalam praktik lokal melalui program edukasi masyarakat, pelibatan komunitas pesisir, serta standar operasional konservasi. Proses ini menunjukkan bahwa konservasi bukan hanya persoalan teknis-ekologis, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial dan politik yang dipengaruhi oleh interaksi antara aktor global dan lokal.

5. Konservasi Penyu sebagai Isu Lingkungan Global

Penyu laut merupakan spesies migratori yang dilindungi oleh berbagai kesepakatan internasional karena perannya yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Ancaman terhadap penyu, seperti perusakan habitat, eksploitasi ilegal, dan perubahan iklim, menjadikan konservasi penyu sebagai isu lingkungan global. Oleh karena itu, upaya perlindungan penyu menuntut pendekatan lintas batas dan keterlibatan berbagai aktor di luar negara.

Dalam konteks ini, NGO transnasional memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara norma global dan implementasi lokal. Keberhasilan konservasi penyu sangat bergantung pada efektivitas tata kelola kolaboratif yang melibatkan NGO, pemerintah, masyarakat lokal, serta komunitas internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami secara mendalam peran NGO transnasional dalam konservasi penyu, dengan menekankan makna, konteks, serta proses advokasi dan tata kelola yang tercermin dalam berbagai dokumen resmi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena pada kondisi alaminya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menafsirkan dan menjelaskan dinamika hubungan antara aktor global dan lokal dalam konservasi penyu.

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa dokumen sekunder yang meliputi laporan tahunan, dokumen kerja sama, deskripsi program, serta publikasi resmi Yayasan Penyu Indonesia (YPI) sebagai mitra pelaksana NGO transnasional. Dokumen yang dianalisis mencakup laporan tahunan periode 2019–2024, yang dipilih untuk menangkap dinamika program konservasi secara berkelanjutan serta perubahan peran NGO dalam kurun waktu menengah. Pemilihan rentang tahun tersebut juga mempertimbangkan konsistensi ketersediaan dokumen dan relevansinya dengan perkembangan kebijakan konservasi penyu di tingkat nasional dan daerah.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2023). Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk kerja sama internasional, pola pendanaan, mekanisme advokasi, pelibatan masyarakat, serta rujukan terhadap norma konservasi global. Data kemudian disajikan secara naratif dan sistematis untuk menunjukkan keterkaitan antara temuan empiris dan kerangka teori hubungan internasional yang digunakan.

Untuk meminimalkan potensi bias akibat penggunaan dokumen yang diproduksi oleh NGO, penelitian ini menerapkan strategi verifikasi dan triangulasi dokumen. Klaim keberhasilan program yang tercantum dalam laporan Yayasan Penyu Indonesia diverifikasi melalui: (1) perbandingan antar-laporan pada tahun yang berbeda untuk menilai konsistensi narasi dan capaian program; (2) pencocokan dengan referensi eksternal, seperti kajian akademik dan publikasi konservasi yang relevan; serta (3) analisis kritis terhadap indikator capaian yang digunakan, dengan menempatkan temuan sebagai indikator kinerja program dan tata kelola, bukan sebagai bukti langsung peningkatan populasi penyu jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tetap bersikap reflektif dan analitis, sekaligus menjaga objektivitas dalam menilai peran NGO transnasional dalam konservasi penyu di Kabupaten Berau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Implementasi Konservasi Penyu di Kabupaten Berau

Penelitian ini mengkaji peran NGO transnasional dalam upaya konservasi penyu di Kabupaten Berau melalui analisis studi dokumen berupa laporan tahunan Yayasan Penyu Indonesia periode 2020-2023. Analisis difokuskan pada cara peran tersebut dijalankan, capaian konservasi yang dihasilkan, serta implikasinya terhadap tata kelola lingkungan dalam relasi global dan lokal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Penyu Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana teknis kegiatan konservasi, tetapi juga berperan sebagai aktor non-negara yang terlibat dalam penyebaran norma konservasi global, pengelolaan pendanaan internasional, serta penguatan jejaring kolaboratif lintas aktor. Temuan ini memperkuat pandangan dalam kajian Hubungan Internasional bahwa NGO transnasional merupakan komponen penting dalam arsitektur tata kelola lingkungan global (Global Environmental Governance).

2. Peran Yayasan Penyu Indonesia sebagai NGO Transnasional dalam Konservasi Penyu

a. Peran Yayasan Penyu Indonesia dalam Jaringan Advokasi Transnasional

Berdasarkan laporan program dan uraian kegiatan yang dianalisis, Yayasan Penyu Indonesia (YPI) berfungsi sebagai penghubung antara agenda konservasi yang

berkembang di tingkat global dan praktik implementasinya di Kabupaten Berau. Dalam kerangka Transnational Advocacy Network (TAN), peran tersebut tampak melalui proses produksi dan penyebaran informasi konservasi, penyampaian laporan kepada mitra internasional, serta pemanfaatan data lapangan sebagai sumber legitimasi bagi aktivitas advokasi dan pengelolaan pendanaan.

Keberadaan laporan tahunan yang disusun secara sistematis dan diarahkan kepada audiens internasional menunjukkan bahwa informasi konservasi tidak semata-mata dimanfaatkan untuk kepentingan internal organisasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana politik untuk menjaga dan memperkuat dukungan global. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa jaringan advokasi transnasional bekerja melalui penggunaan informasi serta tekanan politik sebagai instrumen utama dalam memengaruhi para pengambil keputusan.

b. Tata Kelola Konservasi Penyu Dalam Kerangka Global Environmental Governance

Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa upaya konservasi penyu di Kabupaten Berau dijalankan melalui pola tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, termasuk NGO, donor internasional, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Dalam praktiknya, pengelolaan pendanaan, perencanaan program, hingga proses evaluasi capaian konservasi tidak sepenuhnya terpusat pada negara, melainkan terdistribusi dalam jaringan kerja transnasional yang saling terhubung.

Kondisi tersebut mencerminkan konsep Global Environmental Governance, dimana pengelolaan isu lingkungan global tidak lagi berpusat pada negara sebagai aktor tunggal. Peran Yayasan Penyu Indonesia (YPI) dalam mengelola pendanaan internasional serta menyesuikannya dengan konteks lokal menunjukkan bagaimana tata kelola lingkungan global dijalankan secara operasional hingga tingkat sub-nasional.

3. Capaian Konservasi Yayasan Penyu Indonesia dalam Konservasi Yayasan Indonesia di Kabupaten Berau

a. Indikator Capaian Konservasi Berdasarkan Studi Dokumen

Berdasarkan laporan Yayasan Penyu Indonesia periode 2020-2023, terdapat sejumlah capaian konservasi yang dapat diidentifikasi secara empiris. Capaian ini tidak diartikan sebagai peningkatan populasi jangka panjang, melainkan sebagai indikator keberhasilan program dan tata kelola konservasi.

Tabel 1. Capaian Konservasi Yayasan Penyu Indonesia di Kabupaten Berau

Aspek Konservasi	Bentuk Capaian	Makna dalam Perspektif HI
Perlindungan Habitat	Petroli pantai peneluran dan pengamanan sarang penyu secara rutin	Implementasi norma global konservasi pada tingkat lokal
Penetasan & Pelepasan Tukik	Penetasan sarang terlindungi dan pelepasan tukik terkontrol	Capaian ekologis berbasis intervensi NGO

Tata Kelola Kelembagaan	Program keberlanjutan dan pelaporan tahunan internasional	Akuntabilitas NGO dalam global environmental governance
Pendanaan	Dukungan donor dan yayasan internasional	Leverage Politics dalam jaringan NGO transnasional
Partisipasi Masyarakat	Pelibatan penjaga pantai dan edukasi lingkungan	Transfer norma global dan internalisasi lokal

4. Analisis dan Pembahasan Temuan Penelitian

a. Transfer Norma Global Konservasi Penyu dalam Perspektif Konstruktivisme

Narasi Konservasi penyu dalam laporan Yayasan Penyu Indonesia (YPI) Secara konsisten memosisikan penyu sebagai spesies yang memiliki nilai ekologis pada skala global. Pendekatan tersebut mencerminkan berlangsungnya proses transfer norma global ke tingkat lokal, sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Konstruktivisme Hubungan Internasional. Norma mengenai pentingnya perlindungan penyu sebagai bagian dari warisan bersama umat manusia diinternalisasi melalui berbagai bentuk edukasi masyarakat serta keterlibatan langsung komunitas lokal dalam program-program konservasi. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa proses internalisasi norma tersebut belum berlangsung secara merata. Kondisi ini menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan serta keberlanjutan praktik konservasi yang dijalankan.

b. Perbandingan temuan Penelitian dengan Kajian Terdahulu

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek biologis serta penentuan prioritas konservasi penyu pada tingkat global (Hamann et al., 2010; Wallace et al., 2011). Penelitian ini menghadirkan perspektif alternatif dengan menempatkan konservasi penyu dalam kerangka dinamika politik global yang melibatkan aktor non-negara. Jika kajian terdahulu umumnya memusatkan perhatian pada peran NGO dalam arena negosiasi internasional, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut juga termanifestasi dalam praktik konservasi di tingkat lokal, terutama melalui peraturan tata kelola program dan pengelolaan pendanaan (M. Bestil & Corell, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan menegaskan bahwa Global Environmental Governance tidak hanya beroperasi pada level global, tetapi juga dijalankan melalui mekanisme tata kelola multi-aktor berakar pada konteks lokal.

c. Ketergantungan Finansial Yayasan Penyu Indonesia terhadap Donor Transnasional dan Resiko Keberlanjutan Program

Hasil analisis studi dokumen menunjukkan bahwa sebagian besar program konservasi penyu yang dijalankan Yayasan Penyu Indonesia (YPI) di Kabupaten Berau sangat bergantung pada dukungan pendanaan dari donor dan mitra internasional. Ketergantungan ini tercermin dari struktur laporan tahunan yang secara konsisten menempatkan pendanaan internasional sebagai sumber utama bagi operasional kegiatan konservasi, mulai dari patroli pantai,

pengamanan sarang, hingga program edukasi masyarakat. Dalam kerangka Transnational Advocacy Network, pola ini dapat dipahami sebagai bagian dari *leverage politics*, di mana sumber daya finansial global menjadi instrumen penting untuk mendorong implementasi agenda konservasi di tingkat lokal.

Namun demikian, ketergantungan finansial terhadap donor transnasional juga menghadirkan potensi risiko terhadap keberlanjutan program konservasi. Apabila dukungan donor internasional mengalami pengurangan atau penghentian, terdapat kemungkinan terjadinya penurunan kapasitas operasional, terutama pada kegiatan yang membutuhkan pembiayaan rutin dan berjangka panjang. Dalam perspektif Global Environmental Governance, kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan yang berbasis proyek dan donor-driven cenderung rentan terhadap dinamika politik dan prioritas pendanaan global. Oleh karena itu, keberlanjutan konservasi penyu di Berau tidak hanya ditentukan oleh efektivitas program NGO, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan memperkuat dukungan institusional di tingkat nasional dan daerah.

d. Ketegangan antara Regulasi Konservasi dan Tradisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Peran Mediasi NGO

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya potensi ketegangan antara regulasi konservasi penyu yang ketat sebagaimana dipromosikan oleh NGO transnasional dengan praktik sosial-ekonomi tradisional masyarakat pesisir di Kabupaten Berau. Secara historis, pemanfaatan telur penyu dan sumber daya pesisir lainnya telah menjadi bagian dari strategi penghidupan masyarakat lokal. Penerapan larangan eksploitasi secara ketat berpotensi dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap akses ekonomi dan ruang hidup masyarakat pesisir, terutama ketika alternatif mata pencaharian belum sepenuhnya tersedia.

Dalam konteks ini, Yayasan Penyu Indonesia berperan sebagai mediator antara norma konservasi global dan realitas lokal. Berdasarkan laporan program yang dianalisis, NGO tidak hanya menekankan pendekatan represif atau berbasis larangan, tetapi juga mengembangkan strategi pelibatan masyarakat melalui skema penjaga pantai, edukasi lingkungan, serta pemberian insentif ekonomi berbasis konservasi. Pendekatan ini mencerminkan proses adaptasi norma global ke dalam konteks lokal, di mana konservasi diposisikan bukan sebagai ancaman terhadap budaya dan ekonomi masyarakat, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan bentuk penghidupan yang lebih berkelanjutan.

Dari perspektif konstruktivisme Hubungan Internasional, peran mediasi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi norma konservasi tidak berlangsung secara otomatis, melainkan melalui proses negosiasi sosial yang melibatkan kompromi antara nilai global dan kepentingan lokal. Dengan demikian, keberhasilan konservasi penyu di Berau tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi atau tekanan internasional, tetapi juga pada kemampuan NGO untuk membangun legitimasi sosial dan kepercayaan di tingkat komunitas pesisir.

5. Sintesis Temuan dalam Perspektif Hubungan Internasional

Secara umum, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Yayasan Penyu Indonesia dalam upaya konservasi penyu di Kabupaten Berau merefleksikan dinamika Hubungan Internasional kontemporer, dimana aktor non-negara memainkan peran penting dalam tata kelola lingkungan global. Dalam konteks tersebut, konservasi penyu tidak lagi dapat dipandang semata sebagai ruang interaksi antara norma, relasi kekuasaan, dan kepentingan yang melampaui batas negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa NGO transnasional memiliki peran strategis dalam konservasi penyu di Kabupaten Berau, sebagaimana ditunjukkan melalui studi dokumen Yayasan Penyu Indonesia (YPI). Peran tersebut tidak terbatas pada pelaksanaan teknis konservasi, tetapi mencakup fungsi yang lebih luas sebagai aktor non-negara dalam tata kelola lingkungan global, khususnya dalam advokasi, pengelolaan pendanaan internasional, serta penerjemahan norma konservasi global ke dalam praktik lokal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konservasi penyu di Kabupaten Berau dijalankan melalui pola tata kelola multi-aktor yang melibatkan NGO transnasional, donor internasional, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir. Pola ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan negara-sentris menuju *Global Environmental Governance*, di mana interaksi dan pembagian peran antaraktor menjadi kunci keberhasilan konservasi. Selain itu, temuan penelitian mengindikasikan adanya proses transfer dan internalisasi norma global konservasi penyu melalui program edukasi, pelibatan komunitas, serta skema insentif berbasis konservasi, meskipun proses tersebut masih menghadapi tantangan keberlanjutan dan ketimpangan kapasitas lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model ideal kolaborasi *Multi-Actor Governance* yang berpotensi direplikasi untuk konservasi spesies terancam punah lainnya di Indonesia. Model ini menempatkan NGO transnasional sebagai penghubung normatif dan sumber daya global, pemerintah nasional dan daerah sebagai penyedia kerangka regulasi dan legitimasi kebijakan, masyarakat lokal sebagai aktor kunci pelaksana konservasi berbasis wilayah, serta donor dan mitra internasional sebagai pendukung keberlanjutan pendanaan dan standar akuntabilitas. Kolaborasi ideal tersebut harus didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian peran yang adaptif, serta strategi transisi menuju pembiayaan dan kapasitas lokal yang lebih mandiri guna mengurangi ketergantungan pada donor eksternal.

Dengan menekankan pentingnya sinergi lintas aktor dan lintas tingkat, model *Multi-Actor Governance* yang diidentifikasi dalam penelitian ini tidak hanya relevan bagi konservasi penyu, tetapi juga dapat diterapkan pada upaya perlindungan spesies terancam punah lainnya, baik di ekosistem laut maupun darat di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kontribusi kajian Hubungan Internasional dalam memahami konservasi sebagai proses politik global yang melibatkan relasi kekuasaan, norma, dan kepentingan lintas aktor. Secara praktis, temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan konservasi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

1. Andonova, L. B., Betsill, M. M., & Bulkeley, H. (2009). Transnational Climate Governance. *Global Environmental Politics*, 9(2), 52–73.
2. Arts, B. (2003). *Gemeinschaftsgüter: Recht, Politik Und Ökonomie Preprints Aus Der Max-Planck-Projektgruppe Recht Der Gemeinschaftsgüter Bonn 2003/4 Non-State Actors In Global Governance Three Faces Of Power*.
3. Bernstein, S. (2014). *Legitimacy in global environmental governance*. *Journal of International Law and International Relations*, 10(1), 1–18.
4. Betsill, M. M., & Corell, E. (2008). *NGO diplomacy: The influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations*. MIT Press.
5. Bulkeley, H., & Newell, Peter. (2010). *Governing Climatechange*.
6. Dauvergne, P., & LeBaron, G. (2014). *Protest Inc.: The corporatization of activism*. Polity Press.
7. Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). *International norm dynamics and political change*. *International Organization*, 52(4), 887–917.
8. Hamann, M., Godfrey, M. H., Seminoff, J. A., Arthur, K., Barata, P. C. R., Bjorndal, K. A., Bolten, A. B., Broderick, A. C., Campbell, L. M., Carreras, C., Casale, P., Chaloupka, M., Chan, S. K. F., Coyne, M. S., Crowder, L. B., Diez, C. E., Dutton, P. H., Epperly, S. P., Fitz Simmons, N. N., ... Godley, B. J. (2010). Global Research Priorities For Sea Turtles: Informing Management And Conservation In The 21st Century. *Endangered Species Research*, 11(3), 245–269.
9. Keck, M. E. , & Sikkink, Kathryn. (1998). *Activists Beyond Borders : Advocacy Networks In International Politics*. Cornell University Press.
10. M. Bestil, Michele, & Corell, Elisabeth. (2007). *The Influence Of Nongovernmental Organizations In International Environmental Negotiations*.
11. Nurhayati, A., Putra, P. K. D. N. Y., & Supriatna, A. K. (2022). The Role Of Sea Turtle Conservation Education For Sustainable Marine Tourism Based On Bio-Ecoregion (Case Study In Bali, Indonesia). *Geojournal Of Tourism And Geosites* , 41(2), 477–484.
12. Rustam, A., Purbani, D., Suryono, D. D., Salim, H. L., Sudirman, N., Nur, R., Ati, A., Kusumaningtyas, M. A., Hidayat, W., & Rustam, A. (2023). *Kajian Potensi Karbon Biru Dan Habitat Penyu Di Daerah Konservasi Kabupaten Berau: Studi Kasus Biduk Biduk*.
13. Selmen, D., Ashibly, A., & Fitri, S. N. (2025). Peran Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Konservasi Penyu Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, 9(1).
14. Setiawan, E. B., Boli, P., & Tapilatu, R. F. (2021). Studi Potensi Penyu Dan Persepsi Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Ekowisata Study On Turtle Potential And Community Perception In Ecotourism Development Efforts. *Musamus Fisheries And Marine Journal*, 4(1), 15–25.
15. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
16. United Nations Environment Programme. (2014). *The importance of marine biodiversity to sustainable development*. UNEP.
17. Wallace, B. P., Dimatteo, A. D., Bolten, A. B., Chaloupka, M. Y., Hutchinson, B. J., Abreu-Grobois, F. A., Mortimer, J. A., Seminoff, J. A., Amorocho, D., Bjorndal, K. A., Bourjea, J., Bowen, B. W., Dueñas, R., Casale, P., Choudhury, B. C., Costa, A.,

- Dutton, P. H., Fallabrino, A., Finkbeiner, E. M., ... Mast, R. B. (2011). Global Conservation Priorities For Marine Turtles. *Plos One*, 6(9).
18. Yayasan Penyu Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Yayasan Penyu Indonesia*.
 19. Yayasan Penyu Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Yayasan Penyu Indonesia*.
 20. Yayasan Penyu Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Yayasan Penyu Indonesia*.
 21. Yayasan Penyu Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Yayasan Penyu Indonesia*.
 22. Young, O. R. (2017). *Governing complex systems: Social capital for the Anthropocene*. MIT Press.